



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 166/Kep.DPRD- 02/2016

TENTANG  
SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN  
TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN  
DAERAH, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN  
MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya Tahun sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015, maka perlu untuk menetapkan Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2016;
- b. bahwa Susunan Pimpinan dan Keanggotaan serta Pembidangan Tugas Komisi-Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Tahun Sidang 2016 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Surat Fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  
KESATU : Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Serta Pembidangan Tugas Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2016, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan ini.

- KEDUA : Komisi-komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, Badan Anggaran dan Badan Musyawarah DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun Sidang 2016 sebagaimana Diktum KESATU merupakan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Jawa Barat yang bersifat tetap.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 05 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI



1	2	3	4	5	6
KOMISI II	Bidang Perekonomian : 1. Perdagangan dan Perindustrian; 2. Wilayah Kelautan Daerah; 3. Konservasi Alam; 4. Ketahanan Pangan; 5. Pertanian Tanaman Pangan; 6. Peternakan; 7. Perikanan; 8. Perkebunan; 9. Kehutanan; 10. Logistik; 11. Koperasi dan Pengusaha Kecil, serta; 12. Pariwisata.	1. Ir. Ridho Budiman Utama 2. Dra. Hj. Ijah Hartini 3. Asep Wahyuwijaya, SH 4. Drs. Ade Barkah Surachman, M.Si 5. H. Tien Sutini Bunyamin, S.Sos,M.Ap 6. Drs. H. A. Rozaq Muslim, SH.,M.Si 7. Ir. H. Herry Dermawan 8. R.Yunandar R. Eka Perwira, ST 9. H. Drajat Hidayat Soetarja 10. Agus Welianto Santosa, SH 11. Ir. H. Abdul Hadiwijaya, M.Sc 12. H. Satori, S.Pd,I., MM 13. Toni Setiawan 14. Dra. Hj. Lina Ruslinawati 15. Dadang Kurniawan, S.Ip 16. H. Pepep Saeful Hidayat, S.Ikom 17. H. Cecep Nurul Yakin, S.Pd,M.Ap 18. Dra Tia Fitriani 19. H. Ali Wardana, SE 20. Erni Sugianti, S.AgF	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	

1	2	3	4	5	6
KOMISI III	<p>Bidang Keuangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah,Retribusi, Hasil BUMD dan Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Harta lainnya yg dipisahkan, lain-lain PAD yang sah);</li> <li>2. Dana Perimbangan (PBB, Perolehan Atas Tanah dan Bangunan, DAU, DAK, Penerimaan Sektor Kehutanan, Pertambangan Umum dan Perikanan, Penerimaan dari Pertambangan Minyak &amp; Gas Alam;</li> <li>3. Pajak Air;</li> <li>4. Pinjaman Daerah;</li> <li>5. Perbankan;</li> <li>6. Dunia Usaha;</li> <li>7. Otorita;</li> <li>8. Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD;</li> <li>9. Penanaman Modal Asing;</li> <li>10. Penanaman Modal Dalam Negeri;</li> <li>11. Dan Lain-lain Penerimaan yang Sah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hedi Permadi Boy, SE.,MM.,M.Ec</li> <li>2. DR.H. Siti Aisyah Tuti H., S.Sos.,M.Si</li> <li>3. Didi Sukardi, SE</li> <li>4. Hj. Dede T. Widarsih, SE</li> <li>5. H.E. Kusnadi, SH</li> <li>6. Hj. Sumiyati, S.Pdi</li> <li>7. Iwan Kustiawan</li> <li>8. H. Surahman, S.Sos</li> <li>9. Chaerul Rizky P. Mantini</li> <li>10. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA</li> <li>11. DR. Herlas Juniari, MT</li> <li>12. DR. Sunatra, SH.,MS</li> <li>13. Hj. Gina Fadlia Swara, SE.</li> <li>14. H. Teuku Hanibal, SE</li> <li>15. H. Omin Basuni, SH</li> <li>16. H. Eryani Sulam, M.Si</li> <li>17. DR.Hj. Iemas Masithoh M. Noor, SH,MH</li> </ol>	<p>Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p>	

1	2	3	4	5	6
KOMISI IV	Bidang Pembangunan : 1. Pekerjaan Umum (Kebinaamargaan, Pengairan, Tata Ruang dan Pemukiman); 2. Perencanaan dan Pengendalian; 3. Pembangunan Regional; 4. Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Udara Regional; 5. Perhubungan dan Telekomunikasi; 6. Pertambangan dan Energi; 7. Perumahan Rakyat; 8. Penelitian dan Pengembangan Daerah; 9. Pengendalian dan Perlindungan Lingkungan Hidup.	1. H. Ali Hasan, S.IP 2. Drs. H. Daddy Rohanady 3. Nia Purnakania, SH., M.Kn 4. H. Phinera Wijaya, SE 5. H. Kusnadi, S.Ip 6. Drs. H. Yod Mintaraga, M.PA 7. H. Babay Tamimi 8. Waras Wasisto, SH 9. Ir.H. Gatot Tjahyono, MM 10. Drs. Budiyono 11. Drs. Nur Supriyanto, MM 12. H. Abdul Muiz, Lc 13. H. Wawan Setiawan, SH 14. Wiwin Winingsih, SE 15. H. Ricky Kurniawan, Lc. 16. Ir. H. Lucky Lukmansyah Trenggana 17. H. Marjaya Ibrahim 18. Imran Servia 19. H. Oleh Soleh, SH 20. Ahmad Irfan Alawi	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Gerindra Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi Partai Golongan Karya Amanah Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi PDI-Perjuangan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Demokrat Fraksi Partai Gerindra Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Nasdem Hanura Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	



**LAMPIRAN II KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

**TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2016.**

**NOMOR : 166/Kep.DPRD-02/2016**

**TANGGAL : 05 Januari 2016**

**SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN PEMBENTUKAN PERDA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

<b>ALAT KELENGKAPAN DPRD</b>	<b>TUGAS</b>	<b>NAMA ANGGOTA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>KET.</b>
1	2	3	4	5	6
Badan Pembentukan Perda Provinsi	<p>Tugas :</p> <p>a. menyusun rancangan Program Legislasi Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;</p> <p>b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;</p> <p>c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;</p> <p>d. melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada Pimpinan DPRD;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drs. H. Yusuf Puadz</li> <li>2. R. Yunandar R. Eka Perwira, ST</li> <li>3. Hj. Ida Hernida,SH,M.Si</li> <li>4. Hj. Ganiwati, SH.,MM</li> <li>5. H. Hidayat Royani, SH.,MH</li> <li>6. Hj. Dede T. Widarsih, SE</li> <li>7. Hj. Cucu Sugyati, SE.,MM</li> <li>8. H. Babay Tamimi</li> <li>9. Bambang Mujiharto</li> <li>10. Chaerul Rizky Mantini</li> <li>11. Iwan Kustiawan</li> <li>12. Sadar Muslihat, SH</li> <li>13. H. Abdul Muiz, Lc.</li> <li>14. Ir. Sri Budiharjo Hermawan</li> <li>15. Toni Setiawan</li> <li>16. Wiwin Winingsih, SE</li> <li>17. Dra. Hj. Lina Ruslinawati</li> <li>18. H.Heri Ukasah Sulaeman,S.Pd,M.Si</li> <li>19. K.H. Habib Syarief Muhamad</li> <li>20. Hj. Imas Noeraeni, S.Pd.I</li> <li>21. H. Rustandie, SH</li> <li>22. Erni Sugiyanti.S.Ag</li> <li>23. H. Oleh Soleh. SH</li> </ol>	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Sekretaris (Bukan Anggota)</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>-</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi PDI-Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan</p> <p>Fraksi Nasdem Hanura</p> <p>Fraksi Nasdem Hanura</p> <p>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p> <p>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p>	

	<p>e. Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;</p> <p>f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;</p> <p>g. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan</p> <p>h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.</p>			
--	--	--	--	--

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd  
INEU PURWADEWI SUNDARI

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT****TENTANG : SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN SERTA PEMBIDANGAN TUGAS KOMISI-KOMISI, BADAN PEMBENTUKAN PERDA, BADAN KEHORMATAN, BADAN ANGGARAN DAN BADAN MUSYAWARAH DPRD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN SIDANG 2016.****NOMOR : 166/Kep.DPRD-02/2016****TANGGAL : 05 Januari 2016****SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT**

<b>ALAT KELENGKAPAN DPRD</b>	<b>TUGAS</b>	<b>NAMA ANGGOTA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>FRAKSI</b>	<b>KET.</b>
1	2	3	4	5	6
Badan Kehormatan	<p>Tugas :</p> <p>a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;</p> <p>b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata tertib dan/atau Kode etik DPRD;</p> <p>c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan/atau masyarakat; dan</p> <p>d. melaporkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD.</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. H. Saipudin Zukhri, SH</li><li>2. Dadang Kurniawan, S.Ip</li><li>3. H. Babay Tamimi</li><li>4. Drs. Budiono</li><li>5. DR. H. Abdul Jabar Majid, MA</li><li>6. H. Sahromi</li><li>7. KH. Chumaedi, SH</li></ol>	<p>Ketua</p> <p>Wakil Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa</p> <p>Fraksi Partai Gerindra</p> <p>Fraksi Partai Golongan Karya Amanah</p> <p>Fraksi PDI Perjuangan</p> <p>Fraksi Partai Keadilan Sejahtera</p> <p>Fraksi Partai Demokrat</p> <p>Fraksi Partai Persatuan Pembangunan</p>	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
Ketua,

ttd

INEU PURWADEWI SUNDARI









